

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji mengenai peranan pengawasan kepala desa dalam pendistribusian bansos tepat sasaran kepada masyarakat desa yang terdampak Covid-19 di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Dalam penelitian ini lokus utamanya adalah pada kantor desa bandar setia di kecamatan percut sei tuan dengan metode yang digunakan adalah metode penelitian pendekatan kualitatif. Alasan memilih lokus tersebut karena dalam pendistribusian bansos Covid 19 tidak tepat sasaran. Adapun yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah mengenai pengawasan kepala desa dalam pendistribusian bantuan sosial Covid 19 tepat sasaran. Alasan peneliti memilih fokus penelitian ini karena peneliti tertarik dan ingin memahami peranan pengawasan kepala desa dalam pendistribusian bansos tepat sasaran kepada masyarakat desa yang terdampak Covid 19. Pengawasan harus dilakukan dengan baik, sehingga terciptanya pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan lancar dan dapat menghasilkan hasil kerja yang baik. Dengan adanya kinerja yang baik maka tentu akan memudahkan terlaksananya pengawasan, Pengawasan menjadi sangat penting sekali untuk menjamin terlaksananya kebijakan dari pemerintah.

Pemerintah desa dalam pendistribusian bansos yang dituju kepada masyarakat yang terdampak Covid 19. Pada kenyataannya pendistribusian bansos masih belum tepat sasaran, merata, masih tumpang tindih dalam penyaluran

bantuan tersebut kepada masyarakat yang terdampak Covid 19 dan rentan tampaknya tidak berjalan dengan mulus dan tidak terlepas dari Permasalahan, penyimpangan, penyelewengan dan kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan bansos yaitu dimana pendistribusiannya tidak sepenuhnya tepat sasaran, karena masih ada masyarakat yang kurang mampu di sejumlah daerah seharusnya menerima Bansos namun tidak menerima, yang seharusnya tidak menerima seperti masih bekerja di sektor formal, sudah pindah tempat tinggal, meninggal dunia, dan lain sebagainya menerima Bansos tersebut. Tentu ini menyebabkan paket bansos tidak tepat sasaran dan terlihat pilih kasih. sumber dana bansos yang beragam memungkinkan adanya ketimpangan atau ketidakseimbangan penyaluran bansos yaitu ada penerima bansos ganda sehingga tidak memuaskan semua pihak. Untuk mencapai program bantuan sosial berjalan tepat sasaran, peran pengawasan terutama kepala desa sangat besar agar bantuan-bantuan tersebut sampai ditangan rakyat, karena kepala desa langsung berhadapan dengan rakyatnya. Melalui pengawasan dapat dipantau berbagai hal yang dapat merugikan organisasi dan antara lain mencegah terjadinya penyelewengan dan penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai dari rencana yang sudah ada sebelumnya, melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan dalam pendistribusian bansos tersebut. Pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala desa bukanlah untuk mencari-cari kesalahan, melainkan ditujukan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tepat sasaran serta menghasilkan dampak positif bagi masyarakat.

Peranan Pengawasan Kepala Desa sebagai menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, serta memegang kewenangan pengelolaan keuangan desa. Peran kepala desa sangat di butuhkan untuk melengkapi Data Terpadu Kesejahteraan sosial (DTKSP) agar pembagian bansos bisa berjalan dengan tepat sasaran. Dalam pendistribusian bansos yang dimana Kepala Desa sebagai orang melakukan pengawasan, pimpinan tertinggi yang mengatur wilayah Desa, serta pembinaan dalam hal pendataan dan pendistribusian bansos Covid-19 kepada masyarakat di wilayahnya. Oleh karena itu pentingnya peranan pengawasan kepala desa dalam pendistribusian bansos secara tepat sasaran. Peranan kepala desa sangatlah penting dalam pengawasan pendistribusian bansos secara tepat sasaran kepada masyarakat yang terdampak Covid-19, karena kepala desa lebih paham kondisi, teritori dan karakter masyarakatnya, lebih mengetahui secara pasti data penduduk terdampak Covid-19 yang ada diwilayahnya sehingga menghasilkan data penerima bantuan sosial yang terverifikasi dengan jelas dan penyalurannya diterima oleh masyarakat yang layak untuk menerima bansos tersebut.

Sejak kasus Covid-19 meningkat di Indonesia, berbagai permasalahan sosial dan ekonomi muncul di tengah masyarakat. Tak dapat dipungkiri jika Covid-19 telah hampir melumpuhkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya di beberapa daerah dengan tingkat penyebaran tertinggi seperti Jabodetabek. Masa pandemi Covid-19 yang telah melanda seluruh dunia, dan pandemi ini menjadi perhatian secara global, dalam rangka penanggulangan

penyebaran virus corona dan untuk memutus rantai penyebaran virus corona yang dilakukan pemerintah indonesia dengan menetapkan kebijakan pembatasan Berskala Besar (PSBB) yang juga berdampak pada keterbatasan masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan aspek sosial lainnya, terjadinya krisis finansial ekonomi bagi masyarakat, pandemi virus corona telah memberikan dampak terhadap penurunan aktivitas ekonomi bagi seluruh masyarakat yaitu meningkatnya jumlah pengangguran karena banyaknya karyawan pemutusan hubungan kerja (PHK) serta menurunnya permintaan barang dan jasa hal itu mengakibatkan meningkatnya kemiskinan dan kesenjangan sosial, terjadinya kelumpuhan ekonomi di semua sektor terutama sektor perekonomian masyarakat bawah. menurunnya daya beli, serta pertumbuhan ekonomi yang melambat yang berakibat terjadinya pendapatan yang menurun yang telah sudah dirasakan oleh masyarakat. Semakin hari permasalahan sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat Covid-19 semakin terlihat nyata bagi masyarakat. Pemerintah dalam hal ini pun hadir meluncurkan berbagai paket bansos yang menargetkan masyarakat kurang mampu yang terdampak Covid-19.

Upaya Pemerintah indonesia dalam menanggulangi dampak ekonomi akibat pandemi covid-19 dengan cara memberikan bansos yang sasarannya mengarah kepada kelompok masyarakat kurang mampu. Bantuan Sosial yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia adalah sebagai wujud kehadiran pemerintah kepada masyarakat. Bantuan sosial tersebut dapat berupa uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bansos dapat diberikan secara langsung kepada masyarakat atau lembaga kemasyarakatan

termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan, sifatnya tidak terus menerus/sementara, selektif dan harus memenuhi persyaratan penerima bantuan. Adanya Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi (Permendes PDDT) nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020.

Sebagai usaha dalam menangani dampak ekonomi ini, pemerintah Indonesia telah menyiapkan dana ratusan triliun untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19, terutama masyarakat menengah ke bawah. Beberapa program pun yang diperkenalkan pemerintah mulai dari Program Bantuan Sosial Tunai, BLT dana desa, Listrik gratis, Kartu Prakerja, Subsidi gaji karyawan, Bt usaha mikro kecil. Program bantuan sosial pemerintah provinsi sumatera utara di masa pandemi Covid-19 ini dengan menyalurkan bantuan yang didasarkan kepada 1.321.426 kepala keluarga yang tersebar di 33 kabupaten/kota di sumatera utara. Bansos tersebut bersumber dari refocusing anggaran APBD pemerintah provinsi sumatera utara sebesar Rp. 300 miliar. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyalurkan program jaring pengaman sosial untuk masyarakat yaitu bantuan sembako atau non tunai, bantuan sosial tunai, program keluarga harapan, bantuan pangan non tunai, kartu prakerja. Jumlah bansos tersebut ditetapkan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kabupaten/kota.

Sumber dana bansos bagi masyarakat kabupaten deli serdang dan desa bandar setia yaitu terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) bentuknya uang tunai langsung masuk ke rekening masing-masing, Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa

adalah bantuan tunai dari desa, besarnya 600 ribu, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kementrian/Kemensos, sembako APBN dan APBD.

Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang menjadi salah satu objek yang pantas untuk diteliti, karena merupakan salah satu Desa yang wilayahnya terdampak pandemi Covid-19. dan merupakan desa yang mendistribusikan bansos BLT kepada masyarakat yang terdampak covid-19, yang terdiri atas 10 dusun/lingkungan dengan jumlah penerima 120 KK secara keseluruhan.

Permasalahan dan penyelewengan pendistribusian bansos tidak tepat sasaran kepada masyarakat di desa bandar setia kecamatan percut sei tuan kabupaten deli serdang adalah karena program bansos Covid-19 seperti BLT dana desa yang memakai kouta, yang berarti tidak semua nya mendapat bansos, minimnya informasi desa mengenai data-data yang sudah menerima bantuan dan tidak transparan menjadi polemik masyarakat. Aparat Desa harus lebih transparan untuk bansos ini, karena Masyarakat melihat dan merasakan pilih kasih karena tidak semua masyarakat yang terdampak Covid 19 mendapatkan bantuan tersebut, program bansos yang ada dari pemerintah dalam prosesnya dan realisasi dilapangan masih sering bermasalah, desa bandar setia dalam pendistribusian, masih ada masyarakat yang kurang mampu yang seharusnya menerima Bansos namun tidak menerima, seperti terjadi kasus, sama-sama terdata di DTKS Kemensos sebagai penerima BLT, yang satunya mendapat bantuan tetapi satunya lagi belum menerima, tentu ini menyebabkan paket bansos tidak tepat sasaran. Kepala Desa sebagai orang melakukan pengawasan, pimpinan tertinggi yang

mengatur wilayah Desa, serta pembinaan dalam hal pendataan dan pendistribusian bansos Covid-19 kepada masyarakat di wilayahnya. Peranan kepala desa sangatlah penting dalam pengawasan pendistribusian bansos secara tepat sasaran kepada masyarakat yang terdampak Covid-19, karena kepala desa lebih mengetahui secara pasti data penduduk terdampak Covid-19 yang ada di wilayahnya sehingga menghasilkan data penerima bantuan sosial yang terverifikasi dengan jelas dan penyalurannya diterima oleh masyarakat yang layak untuk menerima bansos tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penjelasan dari paparan diatas, menarik untuk dicermati serta fenomena yang terjadi tersebut, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Pengawasan Kepala Desa Dalam Pendistribusian bansos tepat sasaran kepada masyarakat desa yang terdampak Covid-19”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah yaitu :

Apakah peranan kepala desa dalam pengawasan pendistribusian bansos sudah tepat sasaran kepada masyarakat yang terdampak covid-19 di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu :

Untuk mengetahui peranan pengawasan kepala desa dalam pendistribusian bansos tepat sasaran kepada masyarakat yang terdampak covid-19 di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian dilatar belakang dan rumusan masalah sehingga dapat disimpulkan manfaat penelitian yaitu :

1. Secara Teoritis

Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas HKBP Nommensen dapat memperbanyak dan memperkaya bahan referensi penelitian di bidang ilmu sosial dan ilmu politik. Khususnya bagi program Administrasi Publik dapat menjadi acuan atau bahan pertimbangan bagi mahasiswa melakukan penelitian.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang memberikan pemahaman tentang peranan pengawasan kepala desa dalam pendistribusian bansos tepat sasaran kepada masyarakat desa yang terdampak Covid 19.
- b. Bagi lokasi penelitian dapat menjadi bahan masukan untuk mengetahui peranan pengawasan kepala desa dalam pendistribusian bansos tepat sasaran kepada masyarakat desa yang terdampak Covid 19.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Defenisi Peranan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Peranan berasal dari kata peran. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Menurut Soejono Soekanto (2002:242) Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan

Menurut Soejono Soekanto dalam buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar (2012:212) menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa

yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Menurut Horton (1999:118) Peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status. Setiap orang mungkin mempunyai sejumlah status dan diharapkan mengisi peran yang sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu, status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban dan peran adalah pemeranan dari perangkat kewajiban dan hak-hak tersebut

Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut :

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan adalah perangkat harapan - harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi

masyarakat serta kesempatan - kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

2.2 Defenisi Pengawasan

Pengawasan adalah salah satu fungsi dasar manajemen yang disebut sebagai fungsi *controlling*. Pengawasan menjadi proses kegiatan pimpinan yang sistematis untuk membandingkan, memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta kegiatan organisasi yang akan dan telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan standar, rencana, intruksi dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan organisasi, serta untuk mengambil tindakan perbaikan dan pencegahan yang diperlukan sumber daya yang paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Pengawasan yang dilakukan adalah untuk penilaian terhadap tugas-tugas yang dilaksanakan oleh pegawai atau bawahan untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pekerjaan.

Pengawasan merupakan suatu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan organisasi. Suatu pengawasan dikatakan penting karena tanpa ada pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya sendiri maupun bagi para pekerjanya. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan sangat diperlukan di setiap organisasi. Dengan adanya pengawasan diharapkan dapat meningkatkan hal-hal yang diawasi. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Handoko (2009 : 360 - 361) menjelaskan bahwa “Pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan - tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standart yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan - penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara yang efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan – tujuan perusahaan.

Menurut Ir. Sujamto (1994:10) Pengawasan sebagai fungsi manajemen adalah semua pejabat pimpinan dari setiap organisasi di lingkup masing-masing, pengawasan yang dilakukan oleh para pimpinan bisa disebut pengawasan atasan langsung dan pengawasan melekat. Pengawasan, yang paling pokok adalah biasanya yang dimaksud petugas pengawasan fungsional. itu hanya tanggung jawab aparat pengawasan fungsional dan hanya sebagai alat bantu pimpinan dalam menjalankan fungsi pengawasan. Pemimpin disuatu organisasi adalah pengawas yang sebenar-benarnya.

Kesimpulan menurut penulis Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang mengusahakan agar pekerjaan terlaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan serta hasil yang dikehendaki serta pengambilan tindakan perbaikan bila diperlukan. Tindakan perbaikan diartikan tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan dengan standar pelaksanaan kegiatan. Pengawasan yang efektif membantu usaha dalam mengatur pekerjaan agar dapat terlaksana dengan baik. Fungsi pengawasan merupakan fungsi terakhir dari proses

manajemen. Fungsi ini terdiri dari tugas - tugas memonitor dan mengevaluasi aktivitas perusahaan agar target perusahaan tercapai. Dengan kata lain fungsi pengawasan menilai apakah rencana yang ditetapkan pada fungsi perencanaan telah tercapai.

2.2.1 Tujuan Pengawasan

Tujuan utama dari pengawasan yaitu mengusahakan supaya apa yang direncanakan menjadi kenyataan mencari dan memberitahu kelemahan - kelemahan yang dihadapi. Adapun tujuan pengawasan menurut adalah

- a. Meningkatkan kinerja secara continue, untuk setiap saat mengawasi kinerjanya.
- b. Meningkatkan efisiensi dan keuntungan bagi organisasi dengan menghilangkan pekerjaan yang tidak perlu atau mengurangi penyalahgunaan alat atau bahan.
- c. Menilai derajat pencapaian rencana kerja dengan hasil aktual yang dicapai, dan dapat dipakai sebagai dasar pemberian kompensasi bagi seorang karyawan.
- d. Mengkoordinasikan beberapa elemen atau program yang dijalankan.
- e. Meningkatkan keterkaitan terhadap tujuan organisasi agar tercapai

Tujuan pengawasan akan tercapai apabila hasil - hasil pengawasan mampu memperluas dasar untuk pengambilan keputusan setiap pimpinan. Hasil pengawasan juga dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengambil kebijakan guna mencapai sasaran optimal dan suatu kegiatan penilaian terhadap suatu

kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan rencana atau tidak.

2.2.2 Indikator Pengawasan.

Indikator - indikator dari pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Penetapan standar. pelaksanaan atau perencanaan Dalam pengawasan adalah menetapkan standar pelaksanaan, standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil - hasil.
2. Pengukuran kerja. Pelaksanaan kegiatan penetapan standar akan sia - sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Ada beberapa cara untuk melakukan pengukuran kerja adalah
 - a. Pengamatan
 - b. Laporan - laporan hasil lisan atau tertulis
 - c. Metode - metode otomatis
 - d. Pengujian atau dengan pengambilan sample
3. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja tentunya tak lepas dari motivasi karyawan sebagai penunjang kepuasan dalam melaksanakan tugas sehingga mampu menciptakan kinerja yang baik sehingga menguntungkan bagi perusahaan.
4. Tindakan koreksi. Pengembalian tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar yang dilakukan oleh pegawai.

2.2.3 Jenis Jenis Pengawasan

Adapun beberapa jenis pengawasan yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang mengawasi atau oleh seorang pengawas antara lain :

1. Pengawasan Internal dan Eksternal

Pengawasan Internal (intern) merupakan pengawasan yang dilakukan oleh orang maupun badan organisasi yang terdapat pada lingkungan unit organisasi/lembaga. Sedangkan pengawasan eksternal (ekstern) merupakan pengawasan atau pemeriksaan yang menjadi subyek dijalankan oleh unit pengawasan yang terdapat pihak di luar unit organisasi/lembaga objek yang diawasi.

2. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif merupakan sebuah pengawasan yang dijalankan di aktivitas sebelum kegiatan tersebut dilakukan menjadi dapat mencegah terjadinya kegiatan yang menyimpang dan pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu bersifat terencana. Sedangkan pengawasan represif merupakan suatu pengawasan yang dijalankan kepada suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut dijalankan atau dilakukan dan dikatakan pengawasan represif sebagai salah satu bentuk pengawasan atas jalannya pemerintahan.

3. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan aktif yaitu pengawasan yang dijalankan sebagai bentuk dari pengawasan yang dilakukan ditempat aktivitas yang berkaitan. Sedangkan pengawasan pasif yaitu pengawasan yang dijalankan seperti melalui penelitian dan pengujian terhadap surat atau laporan pertanggung jawaban yang disertai dengan berbagai bukti penerimaan ataupun bukti pengeluaran.

4. Pengawasan Kebenaran Formil

Pengawasan kebenaran formil merupakan pengawasan terhadap segala sesuatu berdasarkan bukti yang tersedia dan pemeriksaan kebenaran materil.

2.2.4 Kendala lemahnya pengawasan

1. Kesadaran dan pengertian tentang pengawasan
2. Keterpaduan sistem pengawasan
3. Koordinasi pengawasan
4. Tenaga dan saranan pengawasan
5. Tindak lanjut pengawasan
 - a. Faktor administratif
 - b. Faktor manajerial
 - c. Faktor politis
 - d. Faktor Budaya
 - e. Kualitas Pengawasan

2.3 Kepemimpinan

2.3.1 Pengertian Kepemimpinan

Menurut Kartini Kartono (2018:2) Kepemimpinan merupakan cabang dari kelompok ilmu administrasi, khususnya ilmu administrasi negara. Dalam kepemimpinan ini terdapat hubungan antar manusia, yaitu hubungan mempengaruhi (dari pemimpin) dan hubungan kepatuhan-ketaatan para pengikut karena dipengaruhi oleh kewibawaan pemimpin.

Menurut Kartini Kartono (2018:38) “Pemimpin adalah seorang pribadi seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan khususnya kecakapan kelebihan di satu bidang, sehingga ia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, demi pencapaian satu atau beberapa tujuan”. Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi orang lain agar mau berperan serta dalam rangka memenuhi tujuan yang telah ditetapkan bersama. Dimana defenisi kepemimpinan akhirnya dikategorikan menjadi 3 elemen yakni :

1. Kepemimpinan merupakan proses
2. Kepemimpinan merupakan suatu relasi (hubungan) antara pemimpin dan bawahan
3. Kepemimpinan merupakan ajakan kepada orang lain

Untuk memahami defenisi kepemimpinan secara lebih dalam, ada beberapa defenisi kepemimpinan yang dikemukakan oleh para ahli yaitu :

- a. Stephen P. Robbins mengatakan kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan
- b. Ricky W. Griffin mengatakan pemimpin adalah seorang individu yang mampu mempengaruhi perilaku orang lain tanpa harus mengandalkan kekerasan
- c. Richard L. Daft mengatakan, kepemimpinan (leadership) adalah kemampuan mempengaruhi orang yang mengarah kepada pencapaian tujuan.

Kepemimpinan atau pemimpin adalah seorang yang memiliki tanggung jawab, kewenangan disertai kemampuan seseorang dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan yang dipercayakan padanya mampu mempengaruhi dan menggerakkan orang-orang yang berada dibawah koordinasinya dalam usaha mencapai tujuan ditetapkan suatu organisasi.

2.3.2 Fungsi Kepemimpinan

Dalam upaya mewujudkan kepemimpinan yang efektif, maka kepemimpinan tersebut harus dijalankan sesuai dengan fungsinya, sehubungan dengan hal tersebut menurut Hadari Nawawi (2005:74) fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan/kelompok masing-masing yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada didalam, bukan berada diluar situasi itu. Pemimpin harus berusaha agar menjadi didalam situasi sosial kelompok atau organisasi.

Kelompok yang efektif hanya akan terwujud apabila dijalankan sesuai dengan fungsinya. Fungsi Kepemimpinan itu berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok atau organisasi masing-masing yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada didalam bukan diluar situasi itu. Fungsi kepemimpinan merupakan gejala sosial, karena harus diwujudkan dalam interaksi antara individu di dalam situasi sosial suatu kelompok atau organisasi karena fungsi kepemimpinan sangat mempengaruhi maju mundurnya suatu organisasi, tanpa ada penjabaran yang jelas tentang fungsi pemimpin mustahil pembagian kerja dalam organisasi dapat berjalan dengan baik.

Menurut Hadari Nawawi (2005:75), secara operasional dapat dikatakan dengan lima fungsi pokok kepemimpinan, yaitu,

1. Fungsi instruktif

Fungsi ini berlangsung dan bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai pengambil keputusan berfungsi memerintahkan pelaksanaannya pada orang-orang yang dipimpin. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa (isi perintah), bagaimana (cara mengerjakan perintah), bilamana (waktu memulai, melaksanakan dan melaporkan hasilnya) dan dimana (tempat mengerjakan perintah) agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif.

2. Fungsi Konsultatif

Fungsi ini berlangsung dan bersifat komunikasi dua arah, meskipun pelaksanaannya sangat tergantung keputusan, pemimpin kerap kali memerlukan bahan pertimbangan, yang mengharuskan berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Konsultasi itu dapat dilakukannya secara terbatas hanya dengan orang tertentu saja, yang dinilainya mempunyai berbagai bahan informasi yang diperlukannya dalam menetapkan keputusan

3. Fungsi Partisipasi

Fungsi ini tidak sekedar langsung dan bersifat dua arah, tetapi juga berwujud pelaksanaan hubungan manusia yang efektif, antara pemimpin dengan dan sesama orang yang dipimpin. Dalam menjalankan fungsi ini pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya.

4. Fungsi Delegasi

Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat/menetapkan keputusan. Fungsi ini mengharuskan pemimpin memilah-milah tugas pokok organisasinya dan mengevaluasi yang dapat dan tidak dapat dilimpahkan pada orang-orang yang dipercayainya.

5. Fungsi Pengendalian

Fungsi ini cenderung bersifat komunikasi satu arah, meskipun tidak mustahil untuk dilakukan dengan cara komunikasi dua arah. Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses/efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif.

2.3.3 Teori Kepemimpinan

Menurut Kartini kartono (2018:32), pada umumnya teori kepemimpinan berusaha untuk memberikan penjelasan dan interpretasi mengenai pemimpin dan kepemimpinan dengan mengemukakan beberapa hal, antara lain :

a. Latar belakang sejarah pemimpin dan kepemimpinan

Kepemimpinan muncul bersama-sama adanya peradaban manusia yaitu sejak zaman nabi-nabi dan nenek moyang manusia yang berkumpul bersama, lalu bekerja bersama-sama untuk mempertahankan eksistensi hidupnya menantang menantang kepuasan binatang dan alam sekitarnya sejak itulah terjadi kerja sama antarmanusia, dan unsur kepemimpinan

b. Sebab munculnya pemimpin

Tiga teori yang menonjol dalam menjelaskan kemunculan kepemimpinan ialah

1. Teori Genetik menyatakan sebagai berikut :

- Pemimpin itu tidak dibuat, akan tetapi lahir jadi pemimpin oleh bakat-bakat alami yang luar biasa sejak lahir
- Dia ditakdirkan lahir menjadi pemimpin dalam situasi kondisi yang bagaimanapun juga, yang khusus
- Secara filosofi, teori tersebut menganut pandangan deterministik.

2. Teori Sosial (lawan teori genetik) menyatakan sebagai berikut :

- Pemimpin itu harus disiapkan, dididik, dan dibentuk, tidak dilahirkan begitu saja
- Setiap orang bisa menjadi pemimpin, melalui usaha penyiapan dan pendidikan, serta didorong oleh kemauan sendiri.

3 Teori Ekologi atau sistesis (muncul sebagai reaksi dari kedua teori tersebut lebih dahulu), menyatakan bahwa seorang akan sukses menjadi pemimpin, bila sejak lahirnya, dia telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan, dan bakat-bakat ini sempat dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan juga sesuai dengan tuntutan lingkungan/ekologinya.

2.3.4 Gaya dan Tipe Kepemimpinan

Menurut Kartini Kartono (2018:34) Pemimpin itu mempunyai sifat, kebiasaan, temperamen, watak dan kepribadian sendiri yang unik khas, sehingga tingkah laku dan gayanya yang membedakan dirinya dari orang lain. “Gaya hidupnya ini pasti akan mewarnai perilaku dan tipe kepemimpinannya.

Menurut Hadari Nawawi (2005:83) bahwa aktivitas kepemimpinan dipilah-pilah maka akan terlihat gaya kepemimpinan dengan polanya masing-masing, gaya kepemimpinan ini gilirannya ternyata merupakan dasar dalam membedakan atau mengklarifikasikan tipe kepemimpinan.

Dari berbagai studi tentang kepemimpinan diketahui ada beberapa Gaya dan Tipe Kepemimpinan yang paling umum dikenal, yaitu :

1. Gaya dan Tipe Kepemimpinan Otoriter

Kepemimpinan otoriter itu mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan yang mutlak dan harus dipenuhi. Setiap perintah dan kebijakan ditetapkan tanpa berkonsultasi dengan bawahannya. Pemimpin bergaya dan bertipe otoriter selalu berdiri jauh dari anggota kelompoknya, dan ia senantiasa ingin berkuasa absolut, tunggal pada kondisi dan situasi yang sikap dan prinsipnya yang kaku, penonjolan diri yang berlebihan sebagai simbol keberadaan organisasi, hingga cenderung bersikap bahwa dirinya dan organisasi identik. Dalam menentukan dan menerapkan disiplin organisasi begitu keras dan menjalankannya dengan sikap yang kaku, pemimpin bergaya dan bertipe ini juga tidak dapat dikritik, bawahannya juga tidak akan mendapat kesempatan untuk memberikan saran maupun pendapat, kalau pemimpin ini adalah mengambil keputusan yang biasanya itu berbentuk perintah dan bawahan hanya melaksanakannya saja.

2. Gaya dan Tipe Kepemimpinan Paternalistik

Gaya dan tipe kepemimpinan paternalistic merupakan kepemimpinan yang bersifat kepatuhan, namun bukan tipe ideal dan bukan tipe yang didambakan. Seorang pemimpin paternalistik senang menunjukkan keberadaan dirinya sebagai simbol orang-orang yang belum dewasa, ia

tidak akan mendorong kemandirian bawahannya karena tidak ingin mereka berbuat kesalahan, terkait dengan itu maka pemimpin paternalistik akan bersifat melindungi, itikadnya mungkin baik tetapi prakteknya akan negatif karena ia tidak mendorong para bawahannya untuk mengambil resiko disebabkan takut akan dampak negatif pada organisasi. Dalam pengambilan keputusan pemimpin paternalistik menjadi pusat pengambilan keputusan pemimpin paternalistik menjadi pusat pengambilan keputusan pada tingkat yang lebih rendah dalam organisasi tidak terjadi.

3. Gaya dan Tipe Kepemimpinan Kharismatik

Gaya dan tipe kepemimpinan kharismatik memiliki kekuatan energy, daya tarik dan pembawaan yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain, sehingga ia mempunyai pengikut yang sangat besar jumlahnya terlepas dari apakah ia berfungsi sebagai pemimpin formal atau informal ia mempunyai daya tarik kuat bagi orang lain sehingga orang lain itu bersedia mengikutinya tanpa selalu biasas menjelaskan apa penyebab kesediaan itu yang dipengaruhi latar belakang biografikal, pendidikan, kekayaan, dan penampilan ikut berperan, akan tetapi mungkin juga tidak, karena ketidakmampuan para ahli mengidentifikasi faktor-faktor penyebab yang dominan, akhirnya hanya ditekankan bahwa seorang pemimpin yang kharismatik memiliki “kekuatan supranatural” yang tidak dimiliki oleh orang lain.

4. Gaya dan Tipe Kepemimpinan Demokratis

Gaya dan Tipe Kepemimpinan Demokratis adalah kepemimpinan yang berorientasi pada memberikan bimbingan yang efektif kepada para bawahannya. Terdapat koordinasi pekerjaan pada semua bawahannya, dengan penekanan rasa tanggung jawab dan kerja sama yang baik. Ia rela dan mau melimpahkan wewenang pengambilan keputusan kepada bawahannya sedemikian rupa tanpa kehilangan kendali keorganisasiannya, dan tetap bertanggung jawab atas tindakan para bawahannya. Pemimpin demokratis bersifat mendidik dan membina, dalam hal bawahannya berbuat kesalahan dan tidak serta merta bersifat menghukum atau mengambil tindakan punitive.

2.3.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah suatu fenomena yang timbul di sebabkan adanya orang-orang, posisi dalam suatu organisasi dan situasi yang spesifik. Hal-hal inilah (orang-orang dan posisi) yang disebut dengan faktor-faktor pengaruh kepemimpinan.

a. Faktor Orang

Faktor orang dapat mempengaruhi kepemimpinan karena konsentrasi kepemimpinan seringkali memusatkan perhatian kepada pemimpin ataupun ciri-ciri pribadinya. Dahulu orang beranggapan bahwa raja ataupun para kaum bangsawan memiliki hal mutlak penguasaan dan kepemimpinannya adalah sesuatu sifat yang diwariskan.

b. Faktor Posisi

Posisi akan melahirkan peran, dengan memiliki posisi tertentu maka akan ada peranan yang mengikutinya. Apabila kita mengikuti perkataan peranan maka kita bermaksud mengatakan apa yang diharapkan akan dilakukan oleh seorang tertentu. Ada dua macam sumber harapan tentang peranan yaitu :

1. Harapan pribadi adalah cara-cara orang mengharapkan pemimpin akan berkelakuan dan bertindak.
2. Harapan organisatoris adalah keinginan organisasi terhadap perilaku pemimpin yang biasanya berpedoman pada posisi formal yang diaturinya di dalam pembagian kerja.

2.4 Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan sosial bisa dipandang sebagai ilmu dan disiplin akademis. Dalam hubungan ini, kesejahteraan sosial adalah studi tentang lembaga-lembaga, program-program, dan kebijakan-kebijakan yang memusatkan pada pemberian pelayanan-pelayanan sosial kepada individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat. Ilmu kesejahteraan sosial berupa mengembangkan basis pengetahuannya untuk mengidentifikasi masalah sosial, penyebab dan strategi penanggulangannya. Kesejahteraan itu meliputi keamanan, keselamatan, dan kemakmuran. Pengertian sejahtera adalah suatu keadaan yang aman, sentosa, dan makmur. Dalam arti lain jika kebutuhan akan keamanan, keselamatan, dan kemakmuran ini dapat terpenuhi maka akan terciptalah kesejahteraan.

Istilah Kesejahteraan sosial bukanlah hal baru, baik dalam wacana global maupun nasional. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) telah lama mengatur masalah ini sebagai salah satu bidang kegiatan masyarakat internasional. PBB memberi batasan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Defenisi ini menekankan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.

Secara umum, istilah kesejahteraan sosial diartikan sebagai kondisi sejahtera (konsepsi pertama), yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan pendidikan dan perawatan kesehatan. Pengertian seperti ini menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan (end) dari suatu kegiatan pembangunan. Misalnya, tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat. Kesejahteraan sosial dapat juga didefinisikan sebagai arena atau domain utama tempat berkiprah pekerjaan sosial. Sebagai analogi, kesehatan adalah arena tempat dokter berperan atau pendidikan adalah wilayah dimana guru melaksanakan tugas-tugas profesionalnya. Pemaknaan kesejahteraan sosial sebagai arena menempatkan kesejahteraan sosial sebagai sarana atau wahana atau

alat untuk mencapai tujuan pembangunan. Kesejahteraan sosial adalah suatu ilmu terapan yang mengkaji dan mengembangkan kerangka pemikiran serta metodologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup (kondisi) masyarakat antara lain melalui pengelolaan masalah sosial, pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dan pemaksimalan kesempatan anggota masyarakat untuk berkembang.

Pengertian diatas menyatakan bahwa kesejahteraan sosial dimanfaatkan untuk meningkatkan sebuah kualitas hidup melalui sebuah pengelolaan masalah sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat terdorong dan bisa mencapai kearah kehidupan yang lebih baik lagi. Ilmu kesejahteraan sosial merupakan kelanjutan dan sebuah penyempurnaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu latar belakang sejarah dan ilmu kesejahteraan sosial pada titik awal masih sama dengan pekerjaan sosial. Profesi pekerjaan sosial mendorong agar terciptanya perubahan sosial, membantu dalam pemecahan masalah pada relasi manusia, serta memberdayakan dan membebaskan manusia untuk mencapai derajat suatu kehidupan yang lebih baik. Upaya yang dilakukan tersebut dilakukan dengan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial. Pekerjaan sosial mengintervensi ketika seseorang sedang berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan prinsip-prinsip hak azasi manusia dan keadilan sosial merupakan hal yang sangat penting bagi pekerjaan sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial adalah segenap strategi dan aktifitas yang dilakukan oleh dunia usaha, maupun *civil society* untuk meningkatkan kualitas kehidupan

manusia melalui kebijakan dan program yang bermitra pelayanan sosial, penyembuhan sosial, perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Prabawa Rosin (2012:58) Kesejahteraan sering diartikan secara luas yaitu sebagai kemakmuran, kebahagiaan, dan kualitas dan kualitas hidup manusia baik pada tingkat individu atau kelompok keluarga dan masyarakat. Keadaan sejahterah dapat di tunjukkan oleh kemampuan mengupayakan sumber daya keluarga untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang dianggap penting dalam kehidupan berkeluarga. Dengan demikian kesejahteraan adalah terpenuhinya seluruh kebutuhan baik barang maupun jasa dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Menurut kolle dalam Rosin, kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan :

1. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah bahan pangan dan sebagainya.
2. Dengan melihat hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya
3. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya
4. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spriritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

2.5. Bantuan Sosial (Bansos)

2.5.1 Defenisi Bantuan Sosial

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Bantuan sosial adalah bantuan langsung dari pemerintah kepada perorangan dan rumah tangga. Termasuk di sini bantuan pemerintah kepada masyarakat akibat bencana alam, peperangan, dan pendidikan yang diterimakan langsung kepada orang yang bersangkutan.

Bantuan sosial menurut peraturan menteri sosial nomor 1 pasal 1 ayat 1 tahun 2019, menyatakan bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan rentan terhadap resiko sosial, Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 13 tahun 2018 yang tercantum dalam pasal 23A ayat 1

menyatakan, bantuan sosial adalah berupa uang kepada individu atau keluarga sebagaimana maksud dalam pasal 23 huruf a, terdiri atas bantuan sosial kepada individu atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, Peraturan Walikota medan nomor 32 tahun 2014 yang tercantum dalam pasal 1 ayat 16 menyatakan bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dan kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Berdasarkan berbagai definisi bantuan sosial tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa bantuan sosial adalah suatu bentuk untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan pemberian uang tunai dan barang berupa sembako yang disalurkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu ataupun masyarakat yang terdampak suatu kesenjangan sosial yang bersifat berkala serta selektif berdasarkan data sehingga tercapai bantuan sosial yang didistribusikan secara tepat sasaran atau berkeadilan.

2.6. Kriteria Pemberian Bantuan Sosial Covid-19

Pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit sebagai berikut :

a. Selektif

Kriteria selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.

b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan

Kriteria memenuhi persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud meliputi :

1. Memiliki identitas yang jelas
 2. Berdomisili dalam wilayah Desa Bandar Setia
- c. Bersifat sementara dan tidak menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan :

1. Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
2. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

- d. Sesuai tujuan penggunaan

Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :

1. Rehabilitas Sosial
2. Perlindungan Sosial
3. Pemberdayaan Sosial
4. Jaminan Sosial
5. Penanggulangan Kemiskinan
6. Penanggulangan bencana

Syarat dan Tata Cara Mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Akibat Covid-

19 Dari Pemerintah Diantaranya sebagai berikut :

1. Calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di Desa.
2. Calon penerima adalah mereka yang kehilangan mata pencarian di tengah pandemi corona.
3. Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat. Ini berarti calon penerima BLT dari Dana Desa tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Kartu Prakerja.
4. Jika calon penerima tidak mendapatkan bansos dari program lain, tetapi belum terdaftar oleh RT/RW, maka bisa langsung menginformasikannya ke aparat desa.
5. Jika calon penerima memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Penduduk (KTP), tetap bisa mendapat bantuan tanpa harus membuat KTP lebih dulu. Tapi, penerima harus berdomisili di desa tersebut dan menulis alamat lengkapnya.
6. Jika penerima sudah terdaftar dan valid maka BLT akan diberikan melalui tunai dan non tunai. Non tunai diberikan melalui transfer ke rekening bank.

Syarat bagi penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp. 600.000 per bulan untuk keluarga Miskin diluar jabodetabek sebagai berikut :

- a. Keluarga miskin yang bukan penerima program keluarga harapan (PKH)

- b. Tidak memperoleh kartu sembako
- c. Tidak mendapat kartu prakerja

Penerima bantuan sosial ini merupakan masyarakat yang terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial DTKS, dan mekanisme pendataan, penetapan data manfaat, dan pelaksanaan pemberian BLT dilakukan sesuai ketentuan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi PDPT. Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan rentan terhadap risiko sosial. Terutama warga yang terkena dampak ekonomi langsung akibat pandemi Covid-19.

2.7. Penyaluran Bantuan Sosial

Penyaluran bantuan sosial dilakukan jika penerima sudah terdaftar dan valid maka BLT akan diberikan melalui tunai dan non-tunai. Non-tunai diberikan melalui transfer ke rekening bank penerima dan tunai boleh menghubungi aparat desa, bank milik negara atau diambil langsung di kantor pos tempat tinggal terdekat

Jika semua berkas dan prasyarat terpenuhi namun belum terdaftar sebagai penerima oleh perangkat desa, maka masyarakat desa terdampak covid-19 bisa mendaftarkan diri ke pemerintah desa secara langsung

Dalam pencairan BLT akan ditransfer ke rekening masyarakat seta disalurkan melalui kementerian sosial, pos indonesia, seta ke bank milik negara seperti BRI, mandiri, BTN, dan BNI

Kepala desa merupakan pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan, pendistribusian, hingga pertanggung jawaban BLT desa, BLT dana desa merupakan program prioritas yang harus dianggarkan oleh pemerintah desa

Jika Pemerintah desa tidak menganggarkan BLT dana desa, pemerintah desa akan dikenakan sanksi mulai dari pemotongan sebesar 50% untuk penyaluran dana desa tahap berikutnya hingga penghentian penyaluran dana desa tahap ke III. Pendampingan serta pengawasan terhadap pemanfaatan BLT dana desa serta pendistribusiannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah.

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu merupakan sumber lampau dari hasil penelitian yang nantinya diusahakan oleh peneliti untuk membandingkan penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian Terdahulu bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu juga bisa sebagai sumber inspirasi yang nantinya membantu pelaksanaan penelitian. Selain itu, peneliti juga bisa memeriksa apa yang kurang dan kelebihan untuk dikembangkan. Adapun Penelitian Terdahulu yang menjadi relevan dan menjadi referensi untuk penulis melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Penelitian dengan judul “Peranan kepemimpinan kepala desa dalam mendistribusikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak covid-19 secara berkeadilan.”. Ditulis oleh Marsinar Sinaga Pada tahun 2020 (Skripsi). Hasil penelitian tersebut adalah Peranan kepemimpinan kepala desa dalam mendistribusikan bantuan kepada masyarakat Yang terdampak Covid 19 secara berkeadilan dapat dikatakan baik, karena hal itu terlihat dari tingkat pelayanan yang dilakukan petugas maupun kepala bagian masing-masing dan melakukan kerja sama kepada masyarakat. Itu terlihat dari tingkat keputusan masyarakat yang telah dirasakan masyarakat. Dinas sosial dan kepala bagian dusun melakukan kerja sama dalam hal untuk menyampaikan informasi publik.
2. Penelitian dengan judul “Peranan Kepala Desa Dalam mengkoordinir bantuan sosial (bansos) secara tepat sasaran kepada masyarakat desa yang terdampak Covid-19 di desa sipultak dolok kec.pagaran, kab.tapanuli utara)”. Ditulis oleh

David Pasaribu pada tahun 2020 (Skripsi). Hasil penelitian tersebut adalah peranan kepala desa dalam mendistribusikan bansos sudah tepat sasaran. Kepala desa dari hasil pengamatan peneliti sudah mengkoordinir pelaksanaan pendistribusian bansos dengan tepat sasaran.

3. Penelitian dengan judul “Efektivitas bantuan langsung tunai dana desa bagi masyarakat miskin terkena dampak Covid-19 di desa talaitad kecamatan suluun tareran kabupaten minahasa selatan”. Ditulis oleh Carly Erfly Fernando Maun pada tahun 2020 (Journal). Hasil penelitian tersebut adalah Penelitian ini dilakukan untuk melihat efektivitas dari program bantuan langsung tunai dana desa khususnya bagi masyarakat miskin yang dirasakan bermanfaat bagi mereka. Pemerintah pusat memberikan bantuan langsung tunai yang diambil dari dana desa yang kemudian disalurkan kepada masyarakat melalui mekanisme dan waktu yang ditetapkan, jika dilihat efektivitasnya dari program tersebut terkait dengan ketepatan waktu penyaluran BLT Dana Desa di desa talaitad, dapat disimpulkan sudah tepat waktu dan mengikuti mekanisme yang ada dan pemerintah desa sudah bekerja sesuai dengan prosedur mengenai dugaan nepotisme dalam penentuan penerima BLT. Pemberian bantuan langsung tunai di desa talaitad kecamatan suluun tareran sudah tepat sasaran.

4. Penelitian dengan judul “Peranan Kepala Desa Dalam Mendistribusikan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Secara Berkeadilan Di Desa Pagar Jati Lubuk Pakam”. Ditulis oleh Mega putri pelangi simanjuntak pada tahun 2020 (Skripsi). Hasil dari penelitian ini adalah Peranan kepemimpinan kepala Desa dalam mendistribusikan bansos secara berkeadilan

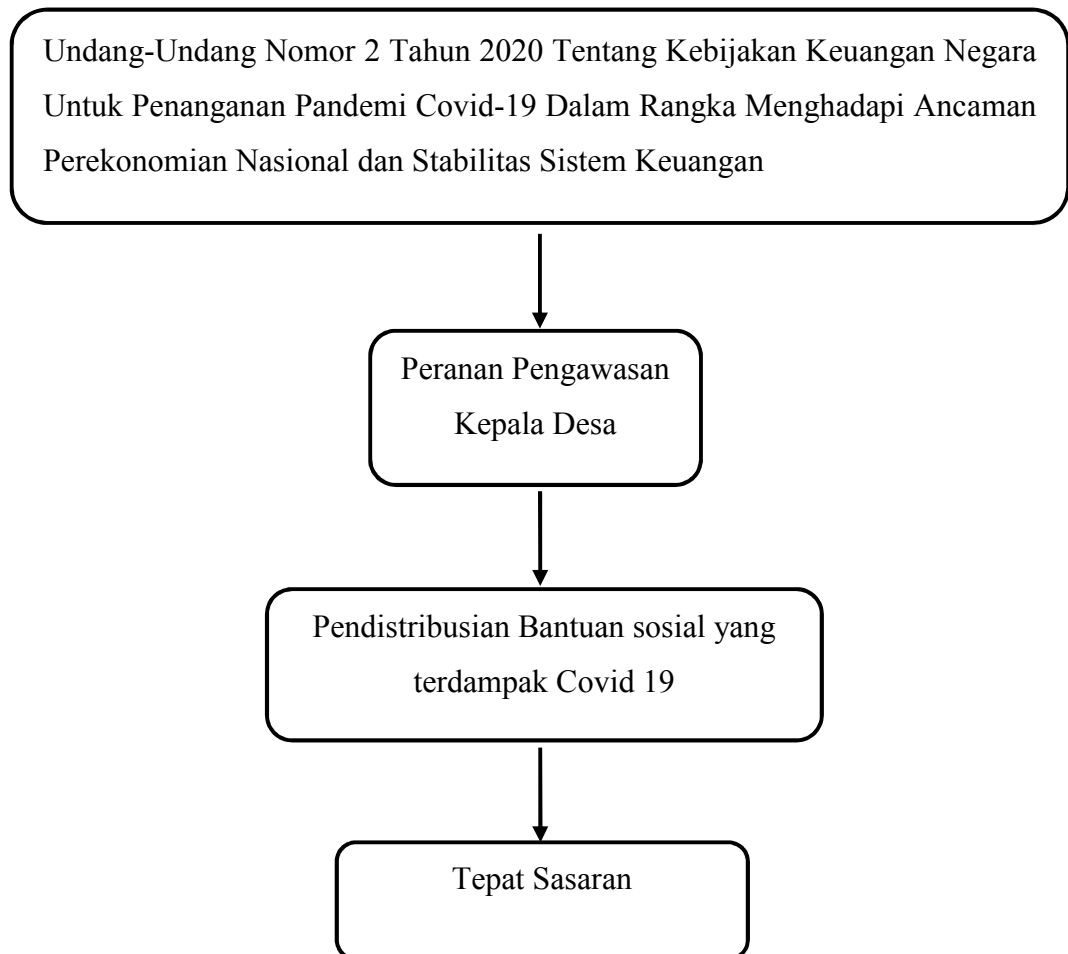
terhadap masyarakat dapat dikatakan baik, karena hal itu dilihat dari tingkat pelayanan yang dilakukan petugas maupun kepala desa dengan aparat desa dan melakukan kerjasama kepada masyarakat itu terlihat dari tingkat kepuasan masyarakat yang dirasakan masyarakat. Dinas sosial dan kepala desa melakukan kerjasama dalam hal untuk menyampaikan informasi publik.

Berdasarkan Penelitian Terdahulu di atas membahas Pendistribusian atau penyaluran bantuan sosial Covid 19. Adapun persamaan yang ditemukan oleh peneliti adalah membahas tentang Pendistribusian program bansos pada masa pandemi Covid-19 sebagai objek penelitian. Dan pada penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sama-sama menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang menggunakan wawancara, observasi, serta dokumentasi dan sama-sama membahas mengenai pendistribusian program bantuan sosial Covid 19. Sedangkan Perbedaan yang di temukan oleh peneliti terletak pada Fokus penelitian. Fokus penelitian ini terletak pada Pengawasan Kepala Desa dalam pendistribusian bansos tepat sasaran. Sedangkan fokus penelitian terdahulu terletak pada Efektivitas, Kepemimpinan, Berkeadilan, Mengkoordinir dalam pendistribusian bantuan sosial Covid 19.

2.9. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini, peneliti merangkai sebuah kerangka berpikir terhadap objek yang akan di teliti antara lain :

Gambar 2.1



Keterangan :

UU No.2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan, diharapkan Peranan Pengawasan Kepala Desa dalam mengawasi pelaksanaan penyaluran bansos kepada sekretaris desa, kepala

dusun dan staff desa dapat memenuhi prosedur dan masyarakat sudah memiliki kriteria sebagai penerima bantuan sosial.

Untuk melaksanakan jaring pengaman sosial sebagaimana diamanatkan dalam peraturan pemerintah undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid 19 dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan bagi masyarakat yang terdampak Covid 19 perlu memberikan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai. Dalam menghadapi situasi Pandemi Covid-19 berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat yang terdampak pandemi covid-19, termasuk pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang layak menerimanya atau yang terdampak kesulitan ekonomi akibat Covid-19. Untuk itu peranan pengawasan kepala desa dalam penyaluran bansos harus di laksanakan dengan baik, supaya pendistribusian dari bansos tersebut tepat sasaran.

Kepala Desa selaku penyelenggara pemerintahan desa dan telah diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk mendistribusikan bantuan sosial Covid 19 kepada masyarakat, Kepala Desa memiliki peranan penting dalam pengawasan pendistribusian bantuan sosial secara tepat sasaran, karena kepala desa mengetahui secara pasti dan lebih paham kondisi masyarakat yang pendapatannya rendah akibat pandemi Covid 19, untuk itu peranan pengawasan kepala desa dibutuhkan, sehingga terwujudnya bantuan sosial yang tepat sasaran.

2.10. Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan sejumlah pengertian atau ciri-ciri yang berkaitan dengan berbagai peristiwa, obyek, kondisi, situasi, dan hal sejenis. Untuk menghindari salah pengertian atas makna konsep-konsep yang dijadikan obyek penelitian maka seorang peneliti harus menegaskan dan membatasi makna-makna konsep yang diteliti. Proses dan upaya penegasan dan pembatasan makna konsep dalam suatu penelitian disebut dengan definisi konsep. Definisi konsep adalah pengertian yang terbatas dari suatu konsep yang dianut dalam suatu penelitian.

Adapun yang menjadi definisi Konsep dalam penelitian ini adalah :

1. Pengawasan kepala desa dalam pendistribusian bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Dengan pengawasan yang dilakukan kepala desa untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan dan meminimalisir penyimpangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan pendistribusian bansos Covid-19 dan menemukan permasalahan yang ada di desa bandar setia. Pengawasan kepala desa berperan penting dalam pengawasan pendistribusian bantuan sosial ini karena kepala desa lebih mengetahui secara pasti data penduduk terdampak Covid-19 yang ada diwilayahnya sehingga menghasilkan data penerima bantuan sosial yang terverifikasi dengan jelas dan penyalurannya diterima oleh masyarakat yang layak untuk menerima bansos tersebut dengan menggunakan indikator sebagai berikut :

1. Penetapan standar. Pelaksanaan atau perencanaan dalam pengawasan adalah menetapkan standar pelaksanaan untuk penilaian hasil - hasil.
 2. Pengukuran kerja .Untuk mengukur pelaksanaan kegiatan pendistribusian bansos tepat sasaran, dengan cara melakukan Pengamatan dan laporan hasil pendistribusian bansos dilaporkan dalam wujud informasi atau berita.
 3. Penilaian kinerja. Dengan adanya kinerja yang baik maka tentu akan memudahkan terlaksananya pengawasan, Pengawasan menjadi sangat penting sekali untuk menjamin terlaksananya kebijakan dari pemerintah dalam pendistribusian bansos Covid-19.
 4. Tindakan koreksi. Tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar yang dilakukan oleh pegawai.
2. Pendistribusian Bansos adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan sebagai usaha dalam menangani dampak akibat Covid-19 khususnya pada bidang ekonomi masyarakat. Peraturan tersebut tercantum dalam permendesa PDTT No 6 tahun 2020 yang menjelaskan bahwa dana anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah adalah

untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 baik yang kesulitan ekonomi maupun masyarakat yang kurang mampu.

3. Tepat Sasaran adalah sesuatu yang menjadi tujuan dari organisasi juga di tingkat pemerintahan. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sasaran, maka dapat menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dapat dikatakan tidak efektif.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Bentuk Penelitian

Secara umum, bentuk penelitian ada 2 (dua) yaitu bentuk kuantitatif deskriptif dan bentuk kualitatif deskriptif merupakan metode-metode untuk menguji teori-teori (theories) tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Menurut John Creswell (2016:4) menyatakan, “Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan”. Oleh karena itu metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Kualitatif diartikan sebagai pendekatan yang menghasilkan data, tulisan dan tingkah laku yang diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri. Oleh karena itu metode yang akan digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Pada umumnya alasan menggunakan metode kualitatif karena permasalahan belum jelas secara holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijangkau dengan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen seperti tes, kuesioner, pedoman wawancara. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori. Penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk untuk menggambarkan atau melukiskan tentang apa yang sedang diteliti dan berusaha memberikan gambaran

yang jelas secara dan mendalam tentang apa yang sedang diteliti dan fenomena yang terjadi menjadi pokok permasalahan.

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Dalam hal ini perlu dikemukakan tempat dimana situasi sosial tersebut akan diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, merupakan desa yang mendistribusikan bansos secara langsung kepada masyarakat desa, Penelitian ini berdasarkan pertimbangan peneliti dalam menyesuaikan konteks penelitian. Alasan memilih Lokasi Penelitian tersebut karena dalam pendistribusian bansos Covid 19 tidak tepat sasaran dan Peneliti tertarik ingin memahami peranan pengawasan kepala desa dalam pendistribusian bansos tepat sasaran kepada masyarakat desa yang terdampak Covid 19 dan dianggap perlu untuk melakukan penelitian yaitu mengenai Peranan Pengawasan kepala desa dalam pendistribusian bansos tepat sasaran kepada masyarakat desa yang terdampak Covid-19. Penelitian dimulai dari tanggal 10 Mei 2021-5 Agustus 2021.

3.3 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajian tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Oleh karena itu, penulis akan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian mengenai peranan pengawasan kepala desa dalam

pendistribusian bansos tepat sasaran kepada masyarakat desa yang terdampak Covid 19.

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sample yang digunakan penulis adalah teknik Nonprobability Sampling yang mengacu pada Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.

Informan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Informan kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini yang menjadi informasi kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Bandar Setia Sugiato.
- 2) Informan Utama, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan utama dalam penelitian ini adalah Ridho ansori sebagai perwakilan Kepala Dusun 2 Bandar Setia.
- 3) Informan Tambahan, yaitu mereka masyarakat desa yang dibutuhkan dalam proses penelitian untuk tambahan data yang diperlukan atau dapat memberikan informasi, informan tambahan penelitian adalah masyarakat desa bandar setia yang menerima bansos Covid-19 yaitu :

1. Siti Rahmah, Dusun 5

2. Muliayadi, Dusun 6

3. Sugianto, Dusun 8

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Penerapan itu digunakan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan yang diwawancarai.

Wawancara dalam penelitian kualitatif biasanya dilakukan secara bebas dan bersifat mendalam yaitu berupa dialog atau Tanya jawab kepada narasumber.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara meneliti dokumen yang relevan atau pengmpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi objek penelitian.

Dapat berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (rekaman).

c. Materi atau Audiovisual

Teknik ini adalah teknik pengumpulan data melalui bentuk foto, saat wawancara, rekaman suara saat wawancara.

3.5 Teknik Analisa Data

Teknik Analisa Data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain

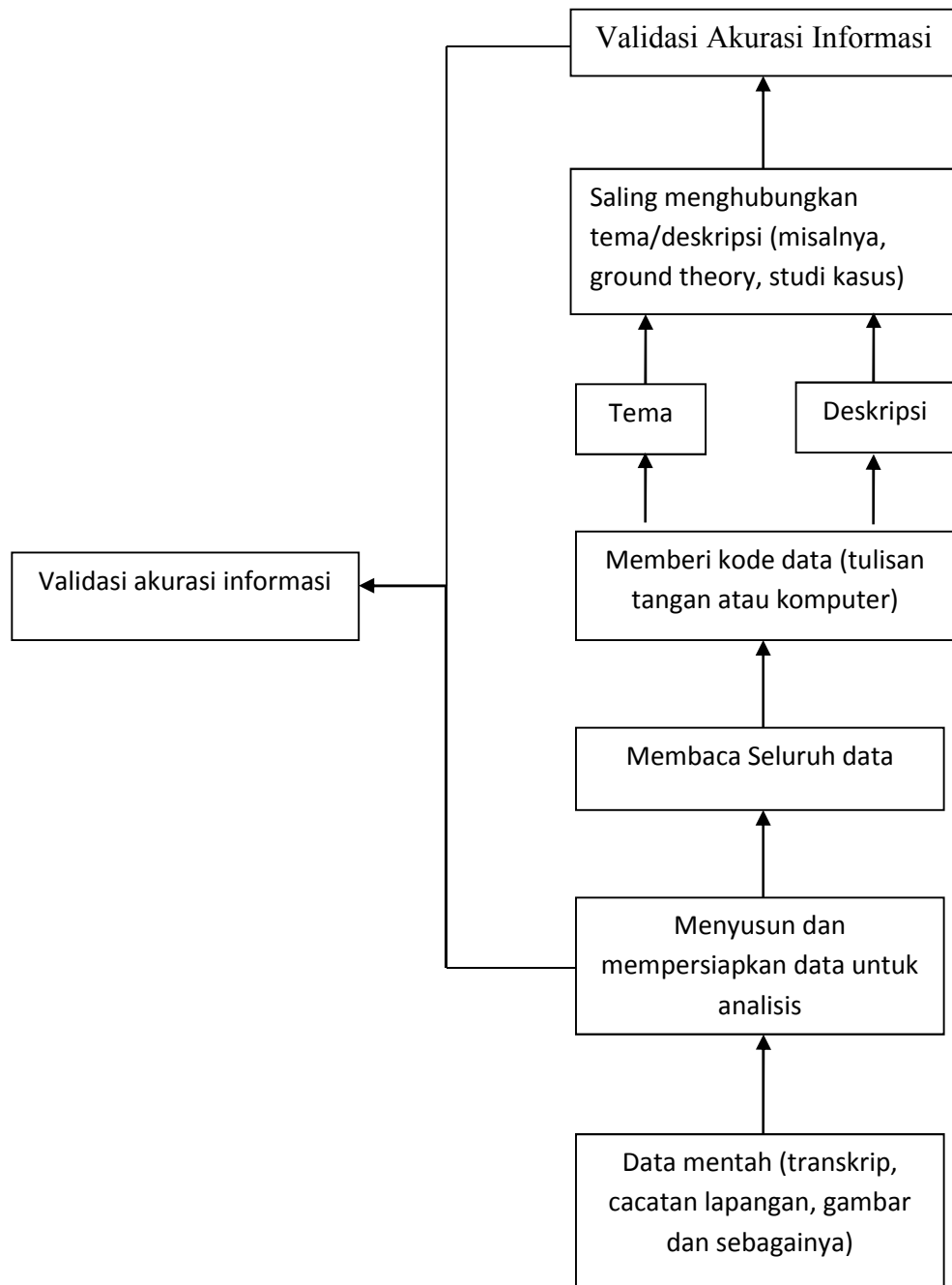
Teknik Analisa Data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara men-scanning materi, menetik data lapangan, atau memilah milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
2. Membaca keseluruhan data. adalah membangun general sence atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.
3. Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data. Coding merupakan proses mengelola materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah ini melibatkan beberapa tahap mengambil data tulisan atau gambar yang telah

dikumpulkan selama proses pengumpulan mensegmentasi kalimat-kalimat (paragraph-paragraf).

4. Menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting orang-orang, kategori-kategori dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi atau peristiwa-peristiwa dalam setting tertentu.
5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.
6. Langkah terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasi atau memaknai data. Mengajukan pertanyaan seperti “pelajaran apa yang bisa diambil dari semua ini ?” akan membantu peneliti mengungkap esensi dari suatu gagasan.

Gambar 3.1 Teknik Analisa Data



Sumber : Buku John W. Creswell, Edisi Keempat, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran, hal. 263

